

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia
- Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, Cv. Rajawali.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung :PT. Alumni
- Bernard Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Unika Parahyangan, Bandung
- Dahlan Thaib 2009, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Perspektif Konstitusional, Total Media*, Yogyakarta.
- H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indoneisa*, Bandung: PT. Mandar Maju
- H. Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- J.Kaloh,2002,*Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta
- Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Jimly assiddiqie, 2015, *Hukum tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar grafika, Jakarta
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Marbun B.N, 1993, *Pertumbuhan Masalah dan Masa depannya*, Jakarta, Airlangga
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mariam Budiharjo, 1995, *Fungsi Legislasi Dalam Sitem Politik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

- Monterio, Josef Mario, 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Muhammad Amin MS, 2007, *Dilema Demokrasi Ketika Pesta Rakyat Bukan Untuk Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Natal Kristiono, 2015, *Buku Ajar Otonomi Daerah*, Universitas Negeri Semarang,
- Nick. T. Wiratomoko, 2004, *Yang Pusat dan yang Lokal Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,
- Paulus Effendi Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rosjidi Rangga Widjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saldi Isra, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti SH., M.Hum & Iwan Satriawan SH., MCL, 2009, *Hukum Tata Negara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta
- Septi Nur Wijayanti, & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. LXVII, Nomor 3 Desember 2015
- Edie Toet Hendratno, 2006. Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Hadapkan Dengan Otonomi Daerah Yang Seluas-Luasnya, *Bisnis & Birokrasi*, Vol. IV, Nomor 7 Desember
- Efik Yusdiansyah. Peran Badan Legislasi Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di DPRD Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Fh. Unisba* Vol. II, Nomor 12 September 2012 – Februari 2013
- Juanda Nawawi, 2015. Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 VIII, Nomor 1, Januari 2015
- Margaretha, Adam Idris, Achmad Djumlani, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi, *Ejournal Administrative Reform*, Vol. 3 III, Nomor 7 Tahun 2014
- Nanda Pratama Sukoco, 2012. Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, *Jejaring Administrasi Publik, Jurnal*, Vol. 3 VIII, Desember, hlm 92.
- Ria Casmi Arssa, 2013, Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Riset, *RechtsVinding*, . *Jurnal*. Vol. III, Nomor 3 Desember
- Sefnat Jitmau *Pembentukan Negara Hukum MIH*, Vol. II, Nomor 2, Februari 2009
- Wasito Utomo *Sistem Federal Dalam Negara Kesatuan*” *Jsp*, Vol. III, Nomor 3 Maret 1998

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah.*
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah.*

Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera*